

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Desa Dukuhwaringin

Berdasarkan letak geografisnya, Desa Dukuhwaringin dengan Kecamatan Dawe berjarak 12 Km, sedangkan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Kudus berjarak 21 Km. dan jarak antara Ibukota Propinsi Jawa Tengah 71 km.¹

Luas Desa Dukwaringin adalah 460. MDPL (meter di atas permukaan laut) memiliki iklim tropis dan suhu hangat. Luas desa Dukwaringin adalah 254 hektar, tergantung jenis tanahnya. Luasnya 110 hektar sawah, dan 144 hektar bukan sawah. (Data Kecamatan Dawe Dalam Angka, 2019) berdasarkan luas tanah di Desa Dukuhwaringin adalah sebagai berikut::

Tabel 4.1.
Luas Wilayah Desa Dukuhwaringin Menurut Jenis Tanah²

Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Jumlah
110 Ha.	144 Ha.	254 Ha.

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS, 2019.

Luas lahan non persawahan desa Dukuhwaringin yang digunakan untuk pertanian atau bangunan 31 hektar, Tegal/Kebun/Huma 20 hektar, dan ladang penggembala 3 hektar. , Tambak / Tambak / Tambak 0,4 hektar. , Dan 90 hektar penggunaan lainnya. Adapun data menunjukkan data luas lahan bukan sawah untuk setiap jenis penggunaan lahan di Desa Dukuhwaringin sebagai berikut:

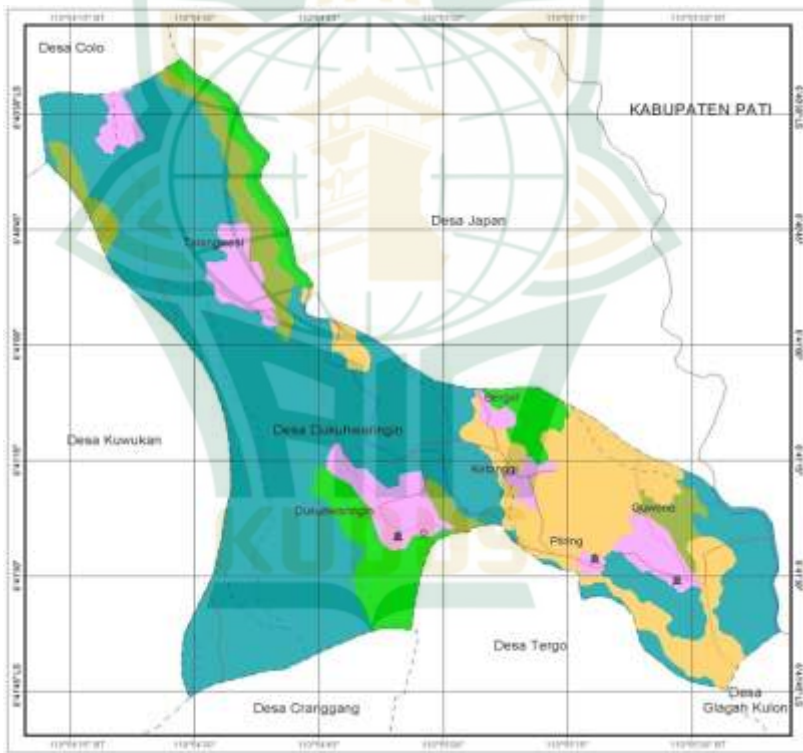
¹ Data kecamatan Dawe Dalam angka, Tahun 2019

² Profil Desa dan Kelurahan Desa Dukuhwaringin (Kudus,2021), 3.

Tabel 4.2.
Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di Desa Dukuhwaringin³

Pekarangan/ Pangunan	Tegal/Kebun / Huma	Pedagang Gembala	Tambak/Kol am/Empang	Lain- lain	Jumlah
31 Ha.	20 Ha.	3 Ha.	0,4 Ha.	90 Ha.	144 Ha.

Gambar. 4.1 Peta Administrasi Desa Dukuhwaringin



b. Sejarah Desa Dukuhwaringin

Pada jaman dahulu di pegunungan Muria terdapat dua desa yaitu Desa Dukoh dan Desa Ketanggi, dimana

³ *Profil Desa dan Kelurahan Desa Dukuhwaringin(Kudus,2021), 4.*

kedua desa tersebut dibatasi oleh sungai. Namun dari hasil musyawarah beberapa tokoh masyarakat maka digabunglah dua Desa tersebut menjadi satu desa yang sekarang disebut sebagai Desa Dukuhwaringin.⁴

Kepemimpinan Desa Dukuhwaringin pada jaman Belanda dipimpin oleh Serung dan dilanjutkan oleh Martodiharjo, dan pada tahun 1960-1979 dijabat oleh Supardi, Tahun 1980 -1990 dijabat oleh Sutopo, tahun 1990-2005 dijabat oleh Sunaryo, selanjutnya Kepala desa Dukuhwaringin dijabat oleh Aris Istiyanto, A.Md di periode 2007-2013, Tahun 2013-2019 merupakan periode yang kedua. dan menjabat di periode ketiga pada Tahun 2019-2025.

c. Asal Usul wisata Kedung Gender

Sejarah awalnya wisata Kedung Gender cukup unik, karena masyarakat disini sendiri tidak tahu adanya potensi wisata Kedung Gender. Semua itu bermula pada tahun 2016 tepatnya antara bulan agustus dan september ada orang yang ingin mengetahui tentang wisata di desa ini, lalu setelahnya pada akhir bulan september di tempat ini kedatangan tamu wisata yang berasal dari Boyolali, yang ingin mengunjungi dan mencari tahu tentang tempat wisata di Kedug Gender, dan mereka itu mengetahui dari Media sosial. Sedangkan, pada saat itu akses menuju tempat wisata itu sendiri juga belum tersedia dan hanya dapat di akses melalui berjalan kaki menyusuri sungai. Berawal dari situ, masyarakat melalui POKDARWIS menyadari bahwa di tempat tersebut terdapat potensi wisata, dan pada tahun itu juga Bapak Kepala Desa bersama masyarakat gotong-royong untuk membuat akses ke tempat wisata dan akses tersebut dalam beberapa bulan sudah dibuka oleh Bapak Kepala Desa, padahal buka aksesnya itu sendiri berawal dari tebing. Dan dana untuk membuka akses itu sendiri berasal dari iuran bersama anak-anak muda dan masyarakat karena tidak adanya donatur dan anggaran, iurannya sendiripun berfariasi mulai dari 5.000, 10.000 dan seikhlasnya. Hasil dari iuran

⁴ *Profil Desa dan Kelurahan Desa Dukuhwaringin(Kudus,2021), 2.*

tersebut dibelikan peralatan seperti linggis, cangkul, dll. Wisata ini dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Desa pada bulan agustus tahun 2017.⁵

Nama kedung Gender sendiri berasal dari kata Kedung dan Gender, kedung sungai yang dalam, sedangkan Gender adalah alat musik pukul logam (metalofon) yang menjadi bagian dari perangkat gamelan Jawa dan Bali. Alat ini memiliki 10 sampai 14 bilah logam (kuningan) bernada yang digantungkan pada berkas, di atas resonator dari bambu atau seng, dan diketuk dengan pemukul berbetuk bundaran berbilah dari kayu (Bali) atau kayu berlapis kain (Jawa). Nadanya berbeda-beda, tergantung tangga nada yang dipakai. Pada gamelan Jawa yang lengkap terdapat tiga gender: slendro, pelog pathet nem dan lima, dan pelog pathet barang.⁶

Bapak Hasanudin sebagai ketua Pokdarwis menyampaikan bahwa

“Menurut sesepuh setempat yang bernama Mbah Supardi, nama Kedung Gender itu bermula dari Gong Gender yang dilemparkan oleh Dampo Awang ke tempat wisata ini pada saat Sunan Muria sedang berdakwah, yang dakwahnya itu menggunakan wayang sebagai alat untuk berdakwah. Karena Dampo Awang tidak sepaham dengan Sunan Muria yang menggunakan wayang sebagai sarana untuk berdakwah. Hal itulah yang mendasari Dampo Awang melemparkan Gong Gender yang di pegang ke arah Sunan Muriah yang sedang berdakwah.”⁷

Sunan Muria mempunyai ciri khas dalam berdakwah adalah penggunaan seni. Dalam hal ini, gunakan Gamelan dan Wayang. Ia memperkenalkan Islam dalam bentuk cerita melalui Gamelan dan Wayang, sehingga mudah dijangkau dan meresap. Melalui pertunjukan seni berupa Gamelan dan Wayang, ia menceritakan berbagai kisah

⁵ Hasil dari Wawancara dengan Kepala POKDARWIS.

⁶ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gender_\(musik\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gender_(musik)).

⁷ Wawancara dengan Kepala POKDARWIS, (Kudus, 30 mei 2022)

religi Islam dengan cara yang menarik. Pemirsa dari berbagai profesi, seperti pedagang, nelayan, pelaut, dan masyarakat umum, memahami nilai-nilai Islam yang disampaikan oleh Sunan Murya. Kisah Wayang, Sunan Muria menggabungkan cerita Islami dengan suara gamelan untuk memberi gambaran yang lebih dalam tentang Islam.⁸

2. Sarana Prasarana Desa

a. Pemerintahan

Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Dukuhwaringin, adapun data Perangkat Desa dan Pemangku lainnya dengan perjanjian kerja Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Administrasi (Jumlah RT, RW, Dusun)⁹

Tabel 4.3
Administrasi (Jumlah RT, RW, Dusun)

No.	Dusun		RW		RT	
	Nama Dusun	Nama Kadus	RW	Nama Ketua RW	RT	Nama Ketua RT
1	Satu	Supangadi	1	Safiq	1 2 3 4 5	Puger W. Marsudi Wagini Sukaryadi Riyanto Heru Sunoko
2	Dua	Sukatwarno	2	Rasdi	1 2 3 4 5	Rohendi Zamroni Sutris Slamet Abdul Muis

⁸ Yoyok Rahayu Basuki, *Sunan Muria (Raden Umar Said)*, (Bogor: Azhar Publisher), 6

⁹ *Profil Desa dan Kelurahan Desa Dukuhwaringin(Kudus,2021)*,5.

2) Pemdes dan BPD¹⁰

Tabel 4.4
Pemdes dan BPD

a) Pemdes

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Aris Istiyanto, A.Md
2	Kasi Pemerintahan	Priyono
3	Kasi pelayanan	Suratno
4	Kaur Keuangan	Suyitno
5	Kaur Perencanaan	Dona Maulana
6	Kadus 1	Supangadi
7	Kadus 2	Sukatwarno
8	Admin Desa	Agus Susanto

b) BPD

No.	Jabatan	Nama
1	Ketua	Murtaji
2	Sekretaris	Noorkin
3	Bedahara	Sulistiyani
4	Anggota	Suparno
5	Anggota	Darwianto

3) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)¹¹

(Posyandu, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Posyantekdes, Satgas adat-istiadat dan nilai sosial budaya, Linmas, dll.).

Tabel 4.5
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

No.	Nama LKD	Alamat	Ketua	Jumlah Anggota	Fokus kegiatan
1	PKK	Dukuhwaringin Rt 02 Rw 01	AMAWATI, SE.	38	Pemberdayaan Wanita
2	KARANG TARUNA	Dukuhwaringin Rt 03 R01	RONJI	34	Pemberdayaan Pemuda
3	LINMAS	Dukuhwaringin	DARLAN	23	Perlindungan

¹⁰ *Profil Desa dan Kelurahan Desa Dukuhwaringin(Kudus,2021), 5-6.*

¹¹ *Profil Desa dan Kelurahan Desa Dukuhwaringin(Kudus,2021), 6.*

No .	Nama LKD	Alamat	Ketua	Jumlah Anggota	Fokus kegiatan
		Rt 03 Rw 02			Keamanan
4	KPMD	Dukuhwaringin Rt 01 Rw 01	NOR HUDA FRIDIANTO	5	Pemberdayaan Masyarakat Desa
5	LPMD	Dukuhwaringin Rt 01 Rw 01	SLAMET, S.Pd	5	Penggerak Pembangunan Desa
6	Posyandu	Dukuhwaringin Rt 01 Rw 01	ENI ERAWATI	30	Pemberdayaan anak usia dini dan lansia
7	POSYANTE KDES	Dukuhwaringin Rt 01 Rw 01	DONA MAULANA	15	Pemberdayaan TTG

- 4) Lembaga Sosial Kemasyarakatan / LSK (Pengajian, LSM, Marawis, Poktan, Gapoktan, Pokdarwis, Banser, Fatayat, IPNU-IPPNU, dll diluar LKD)¹²

Tabel 4.6

Lembaga Sosial Kemasyarakatan / LSK (Pengajian, LSM, Marawis, Poktan, Gapoktan, Pokdarwis, Banser, Fatayat, IPNU-IPPNU, dll diluar LKD)

No.	Nama LSK	Alamat	Ketua	Jumlah anggota	Fokus kegiatan
1	POKDARWIS	Dukuhwaringin Rt 05 Rw 01	HASANUDIN	17	Pariwisata air terjun
2	GAPOKTAN	Dukuhwaringin Rt 04 Rw 01	NUR KHALIMI	40	Pertanian
3	MUSLIMAT NU	Dukuhwaringin Rt 01 Rw 01	ICHWATI	50	Pengajian

b. Sarana Pemerintahan Desa

Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa yang ada di Desa Dukuhwaringin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7

Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa¹³

a. Balai Desa	Ada
b. Kantor Desa	Ada

¹² Profil Desa dan Kelurahan Desa Dukuhwaringin(Kudus,2021), 7.

¹³ Profil Desa dan Kelurahan Desa Dukuhwaringin(Kudus,2021), 14.

c. Mesin Ketik	1 buah
d. Komputer	5 buah
e. Meja	13 buah
f. Kursi	78 buah
g. Almari Arsip	7 buah
h. Kantor BPD	Ada
i. Kendaraan Dinas	3 buah

Dapat disimpulkan Pada data diatas bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Dukuhwaringin Memiliki kelengkapan yang cukup lengkap.

c. Visi Misi Desa Dukuhwaringin

1) Visi Desa Dukuhwaringin

Semakin majunya perkembangan zaman tantangan Birokrasi Pemerintah Desa di masa depan yang dihadapi akan lebih kompleks dan mencakup berbagai aspek, baik yang bersifat alamiah hingga aspek Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Beriringan menggunakan penerapan Otonomi Daerah yg lebih luas & bertanggung jawab, maka sangat perlu buat suatu Pemerintah Desa sebagai berkualitas & profesional pada menjalankan kiprah & fungsi, supaya bisa mewujudkan bentuk pemerintah yg Good Government sinkron menggunakan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi segala aspek kebutuhan tersebut, maka Pemerintah Desa wajib mempunyai Visi yg bertenaga kedepan. Adapun visinya sebagai berikut :

Visi : *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Masyarakat yang Baik (Good Governance and Good Publik Services)”*

2) Misi Desa Dukuhwaringin

Setelah merumuskan visi, pemerintah desa juga harus merumuskan misi desa sebagai alat untuk

mewujudkan visi tersebut. Misi ini dikembangkan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, BPD, LKMD, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Desa Dukuharingin mengembangkan misi., sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.
- b) Meningkatkan ketenteraman, ketertiban, perlindungan, dan kehidupan politik masyarakat.
- c) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Desa.
- d) Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik.

3. Kondisi Perekonomian Desa

Desa Dukuhwaringin terletak di Kecamatan Dawe, dan Almar Pertanian Bupati Kudu adalah petani subsisten masyarakat yang berwiraswasta dan berwiraswasta. Oleh karena itu, keberadaan pariwisata menjadi prioritas utama bagi pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan. Adapun data mata pencaharian masyarakat Desa Dukuhwaringin sebagai berikut :

Tabel 4.8
Perekonomian Desa Tahun 2019¹⁴

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani	464 orang
2	Buruh Tani	330 orang
3	PNS	15 orang
4	Peternak	37 orang
5	TNI	1 orang
6	Pedagang keliling	7 orang
7	Wiraswasta	35 orang
8	Bengkel/montir	8 orang
9	Karyawan swasta	65 orang

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Dukuhwaringin

¹⁴ *Profil desa dan Kelurahan desa Dukuhwaringin (Kudu,2021), 7.*

adalah petani. Mata pencaharian terendah ada sebagai TNI.

4. Kondisi Sosial Budaya

Menurut data tahun 2022, jumlah kepala desa Dukwaringin adalah 509 KK, dan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur¹⁵

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1-15	109	118	227
16-55	468	474	942
56-75	167	152	319
>75	27	33	60
Jumlah	771	777	1.548

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Desa Dukwaringin menurut jenis kelamin adalah golongan, jenis kelamin, usia anak 227, usia muda 942, usia kerja 319, dan usia lansia adalah ada 60 jiwa.

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Dukwaringin cukup berimbang. Selain itu, jumlah penduduk yang masih dalam kategori “*produktif*” atau “*remaja*” sangat besar, 942, dan 60 pada kategori lanjut usia.

Tabel 4.10
Jenjang Pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Dukuhwaringin¹⁶

No.	Jenjang Pendidikan Terakhir warga	Jumlah Orang
1	SD	470 orang
2	SLTP	345 orang

¹⁵ Profil desa dan Kelurahan desa Dukuhwaringin (Kudus,2021), 4.

¹⁶ Profil Desa dan Kelurahan Desa Dukuhwaringin (Kudus,2021), 11.

No.	Jenjang Pendidikan Terakhir warga	Jumlah Orang
3	SLTA	430 orang
4	D 1	12 orang
5	D 2	10 orang
6	D 3	7 orang
7	S 1	32 orang
8	S 2	4 orang

Pada Data tersebut terlihat bahwa mayoritas Pendidikan masyarakat Desa Dukuhwaringin adalah Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas, dengan angka 775 Orang. Sedangkan masyarakat yang berpendidikan Tinggi seperti D1, D2, D3, S1, dan S2 masih terbilang sedikit. Untuk itu perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpendidikan tinggi agar bisa meningkatkan kualitas SDM yang nantinya dapat bermanfaat untuk memajukan Desa Dukuhwaringin.¹⁷

B. Deskripsi Data

Berdasarkan dari hasil penelitian serta di perkuat oleh data yang di dapatkan oleh peneliti, Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil yang sudah dilakukan. Sebagaimana telah di jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam pengambilan data, peneliti menggunakan beberapa metode seperti Observasi Lapangan, Wawancara dengan pihak terkait, dan serta Dokumentasi. Hasil selama proses penelitian ini dilakukan akan penulis paparkan secara detail dan sistematis.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Penyelenggaraannya, desa perlu lebih kreatif dan mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya. Kreativitas ini penting mengingat undang-undang memberikan ruang yang relatif besar bagi desa dan mengharuskannya untuk mengelola dan mengoptimalkan potensinya..

Salah satu poin penting dari UU No. 6 Tahun 2014 adalah bahwa desa memiliki hak lokal setingkat desa. Artinya,

¹⁷ *Profil desa dan Kelurahan desa Dukuhwaringin (Kudus,2021), 11.*

semua sumber daya yang ada di lingkungan dan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa akan diserahkan kepada pemerintah desa untuk dikelola secara mandiri. Kondisi ini berbeda dengan kondisi sebelumnya dimana organisasi pemerintahan terendah adalah Kabupaten/Kota. Desa sebagai *hal de facto* dalam kehidupan masyarakat terbatas pada pelaksanaan pekerjaan pembantu. Perubahan status ini akan berdampak pada peningkatan kewenangan dan memberikan peluang yang besar bagi desa untuk mengembangkan dirinya.

Adapun peraturan-peraturan Desa Dukuhwaringin terhadap desa wisata adalah :

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- c) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- d) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- e) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- f) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- g) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

1. Peran Pemerintah dalam mengembangkan objek wisata di Desa Dukuhwaringin

Pengelolaan Potensi Pariwisata tidak luput dari Peran Pemerintah, khususnya Pemerintah Desa Dukuhwaringin sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya bahwa letak wisata Air Tejun Kedung Gender beara di Desa Dukuhwaringin.

Peran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah desa Dukuhwaringin dalam mengembangkan potensi wisata gender Kedung adalah sebagai berikut::

a. Penyediaan Fasilitas Wisata

Dalam rangka untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sehingga berdampak terhadap peningkatan jumlah pengunjung ke tempat wisata Kedung Gender, Pemerintah Desa Dukuhwaringin menyediakan fasilitas berupa akses jalan baru menuju tempat wisata Kedung Gender, yang mana jalan tersebut awal mulanya di buat tanpa ada anggaran dana dari desa, namun Kepala Desa

Dukuhwaringin berinisiatif mengumpulkan para warga dan mengajak untuk bergotong royong, sekaligus urun dana untuk di belikan peralatan yang bisa digunakan untuk proses pembuatan akses jalan baru menuju tempat wisata, selain itu Pemerintah Desa Juga menyediakan fasilitas pelengkap seperti Toilet, Gazebo (Tempat Bersantai), Warung UMKM, Parkir yang memadai dan bisa untuk rombongan Roda 4 serta adanya tempat ibadah yang lokasinya berada didepan tempat wisata.

b. Kerjasama

Pelaksanaan pengembangan potensi wisata air terjun kedung gender pemerintah tidak bekerja sendiri. Pemerintah desa kedung gender bekerjasama dengan pihak ketiga seperti :

1) POKDARWIS

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) itu sendiri adalah organisasi yang sudah terbilang cukup eksis, terstruktur dan saling terhubung dengan Pokdarwis di daerah lain. Tugas Pokdarwis itu sendiri sebagai pengelola tempat wisata air terjun kedung gender, terbentuknya Pokdarwis di Desa Dukuhwaringin telah di SK-kan langsung oleh kepala desa.

Adapun susunan keanggotaan Pokdarwis sebagai berikut :

Susunan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS Kedung Gender) Periode Tahun 2017 s/d 2022

Tabel. 4.11
Susunan Keanggotaan POKDARWIS Kedung Gender)
Periode Tahun 2017 s/d 2022

No.	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Pembina	Kepala Desa	Dukuhwaringin RT 02 Rw 01
2	Penasehat	1. Suparno	Dukuhwaringin RT 04 RW 01

No.	JABATAN	NAMA	ALAMAT
		2. Ronzi	Dukuhwaringin RT 03 RW 01
4	Ketua	1. Hasanudin	Dukuhwaringin RT 05 RW 01
5	Sekretaris	2. Noor Khalimi	Dukuhwaringin RT 04 RW 01
6	Bendahara	1. Usmanto	Dukuhwaringin RT 04 RW 01
		2. Wahyu Widyawati	Dukuhwaringin RT 05 RW 01
KOORDINATOR BIDANG			
WISATA RELIGI DAN BUDAYA	1. June Anom Surya		Dukuhwaringin RT 04 RW 01
	2. Edi Priyatna		Dukuhwaringin RT 02 RW 01
	3. Rusdiyono		Dukuhwaringin RT 05 RW 01
WISATA ALAM DAN BUATAN	1. Marjo		Dukuhwarigin RT 05 RW 01
	2. Tri Haryanto		Dukuhwaringin RT 05 RW 01
	3. Noorkin		Dukuhwaringin RT 05 RW 01
WISATA KULINER DAN HOME INDUSTRI	1. Sutriyanti		Dukuhwaringin RT 05 RW 01
	2. Sukanah		Dukuhwaringin RT 05 RW 01
	3. Suryadi		Dukuhwaringin RT 04 RW 01
	4. Srikah		Dukuhwaringin RT 02 RW 02
HUMAS DAN PROMOSI		1. Ari Wibowo	Dukuhwaringin RT 05 Rw 01

No.	JABATAN	NAMA	ALAMAT
		2. Windi Setiyawan	Dukuhwaringin RT 01 RW 01
		3. Sri Mulyani	Dukuhwaringin RT 05 RW01
DOKUMENTASI		1. Moch Lazwar Mufirad	Dukuhwaringin RT 05 Rw 01
		2. Siswoyo	Dukuhwaringin RT 05 RW 01
		3. Maskuri	Dukuhwaringin RT 02 RW 02
HOM STAY		1. Heriyanto	Dukuhwaringin RT 05 RW 01
		2. Tri Jumat	Dukuhwaringin RT 04 RW 01
		3. Sunaryo	Dukuhwaringin RT 03 Rw 02
PEMANDU		1. Zaenal Anwar	Dukuhwaringin RT 05 Rw 01
		2. Rohman	Dukuhwaringin RT 05 RW 01
		3. Istiyannah	Dukuhwaringin RT 01 RW 01
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN TATA RUANG		1. Taufik Efendi	Dukuhwaringin Rt 03 Rw 01
		2. Sutarno	Dukuhwaringin RT 05 RW 01
		3. Siswanto	Dukuhwaringin RT 01 RW 02
AKOMODASI DAN TRANSPORTASI		1. Susanto	Dukuhwaringin RT 04 RW 01
		2. Al Ahmad	Dukuhwaringin RT 01 RW 02
		3. Rojabun Isa	Dukuhwaringin RT 05 RW 01
KEAMANAN		1. Joko Santoso	Dukuhwaringin

No.	JABATAN	NAMA	ALAMAT
			RT 05 RW 01
		2. Supat	Dukuhwaringin RT 04 RW 01
		3. Nurul Al Amin	Dukuhwaringin RT 01 RW 01
		4. Muad Hasan	Dukuhwaringin RT 01 RW 01
		5. Sudarlan	Dukuhwaringin RT 03 RW 02

2) Biro Perjalanan Wisata

Biro Perjalanan Wisata adalah perusahaan yang menyediakan jasa perencanaan perjalanan dan jasa organisasi perjalanan seperti reservasi tiket, akomodasi, dan pengelolaan dokumen perjalanan.¹⁸

Kerjasama dengan birowisata ini dalam bentuk paket wisata, dimana kerjasama tersebut dilakukan menggunakan media Online dan media Offline, adapun media Online nya seperti Facebook (Kedung Gender) dan Instagram (Kedung Gender). sistem kerjasama ini Birowisata mendapatkan 10% dari harga paket wisata 30.000/orang. Paket wisata itu terdiri dari objek wisata air terjun, kampung lebah, daan melihat UMKM di Dukuhwaringin. Pada saat wisata datang ada salah satu pihak Pokdarwis yang telah terpilih sebagai Tourguaide datang menjemput wisatawan ketika tiba di lokasi wisata untuk mengarahkan ke destinasi wisata.

Kerjasama ini dilakukan dengan birowisata yang berada di Kabupaten Kudus dan beberapa daerah disekitar Kudus. Kerjasama ini dijalankan langsung oleh Pokdarwis dengan birowisata, dimana nantinya birowisata tersebut datang ke tempat wisata membawa tamu wisata seperti pelajar, dan tamu wisata organisasi, biasanya rombongan berdatangan

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Biro_perjalanan

ke tempat wisata menggunakan kendaraan roda empat, seperti mini bus dan Bus pariwisata.

Bapak Hasanudin selaku Ketua Pokdarwis memberikan pernyataan bahwa

*“sistem kerjasama ini Birowisata mendapatkan 10% dari harga paket wisata 30.000/orang. Paket wisata itu terdiri dari objek wisata air terjun, kampung lebah, daan melihat UMKM di Dukuhwaringin”*¹⁹

3) UMKM Desa Dukuhwaringin

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²⁰

Dalam kerjasama dengan umkm ini juga dilakukan oleh Podarwis, dimana Pokdarwis yang bertugas sebagai tour guaide mengantarkan wisatawan yang telah memilih paket wisata seharga Rp. 30.000,00 ke tempat sentra UMKM yang berada pada Desa Dukuhwaringin. adapun produk yang dihasilkan oleh UMKM di Desa Dukuhwaringin seperti, Sirup dan Sari Buah Parijoto, Teh daun kopi dan daun binahong, jahe, daun salam, daun alpukat. rata rata tanamnnya hasil dai budidaya Marlan (Kecuali Parijoto) yang diambil dari petani di Desa Colo kecamatan Dawe.

Di tegaskan dari penjelasan bapak Hasanudin, ketua Pokdarwis Desa Dukuhwaringin

“UMKM di Desa Dukuharingin nanti di branding produknya Dukuh Seboyjati, jadi sebgiaan produk Dukuhwaringin sudah berada disitu, hasil produk seperti madu dan lain sebagainya ditempatkan di tempat tersebut, jadi wisatawan nanti pulangny diarahkan melalui lokasi tersebut agar membeli buat oleh oleh

¹⁹ Wawancara dengan Kepala POKDARWIS, (Kudus, 30 mei 2022)

²⁰ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia), 1

sambil berjalan sebelum pulang. Jenis jenis produknya, seperti : Sirup parijoto, Teh daun Kopi, Binahong, khas desa waringin juga ada minuman Jasase, dan kalo makanan khasnya itu pecel Pakis”²¹

4) Home Stay

Home stay ini dibuat oleh masyarakat setempat dimana masyarakat di sekitar tempat wisata memanfaatkan rumahnya untuk dijadikan penginapan.

Bapak Hasanudin menjelaskan bahwa:

“Home stay ini bermula dari adanya kamar yang nganggur,karena orangnya kerja diluar kota atau anaknya ada yang sudah menikah lalu tinggal dirumah sendiri seperti itu. Disisilain keunggulan homestay ini adalah perihal kearifannya, seperti hubungan keluarganya pada saat pelayanan terjadi. Seperti contoh waktu itu, ada rombongan crew TVRI yang mau syuting lalu crewnya itu saya tempatkan di homestay, itu yang punya homestay pada saat pulang udah nangis nangisa udah seperti kehilangan saudaranya. Jumlah homestay ini sendiri berjumlah 12, biasanya satu rumah ada yang 2 kamar dan 3 kamar, untuk harganya itu sendiri permalam harganya Rp.75.000 (free Breakfast dengan menu khas seperti pecel dan miumnya seperti kopi atau teh yang khas sini juga)”.²²

Pengelolaan Homestay itu tersendiri sudah terorganisir oleh Pokdarwis dan masyarakat yang memiliki Homestay juga di berikan pelatihan khusus untuk bagaimana cara menerima dan melayani tamu dengan baik.

5) Dinas Pariwisata Daerah

Kerjasama dengan dinas pariwisata daerah Kab. Kudus atau yag lebih dikenal denga Disparbud

²¹ Wawancara dengan Kepala POKDARWIS, (Kudus, 30 mei 2022)

²² Wawancara dengan Kepala POKDARWIS, (Kudus, 30 mei 2022)

(Dinas Pariwisata dan Kebudayaan). Bapak Hasanudin sebagai ketua Pokdarwis menjelaskan bahwa:

“Dalam hal kerjasama antara disparbud dan para pelaku wisata tersebut bersifat support langsung seperti memberikan pelatihan pelatihan cara menyambut dan melayani tamu yang akan menggunakan homestay, disisi lain juga ada pelatihan untuk sentra unit usaha yang sudah tumbuh disekitar tempat wisata air terjun kedung Gender serta tata cara pengelolaan wisata yang baik.”²³

Hal tersebut sudah sejalan dengan sebgaiamna fungsi dari Dinas Pariwisata Daerah (Disparhub). Pelaku Pariwisata dan Kebudayaan, UPTD Koordinator, UPTD Isu Pariwisata, Seni, Budaya dan Film, Penyelenggara Pariwisata dan Budaya, Pembinaan, Pembinaan, Kebijakan untuk Berkoordinasi di Wilayah Kerjanya Ketika mengeluh tentang rumusan koordinasi, pariwisata, masalah budaya..

6) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimna yang telah kita ketahui bahwa pemerintah sangat berperan penting dalam mengembangkan pariwisata dalam menyediakan infrastruktur, tidak hanya berbentuk fisik namun juga dalam bentuk menyoiapkan SDM yang unggul dalam menyokong kemajuan pariwisata.

Dalam kerjasama ini pemerintah provinsi memberikan support awal berupa memberikan Surat Keputusan (SK) Desa Wisata pada Desa Dukuhwaringin, sebagaimna yang telah dijelaskan oleh bapak Aris Istiyanto:

“Pada Tahun 2019 Pemerinta Provinsi melalui Gubernur telah memberikan Surat Keputusan (SK) Desa Wisata pada Desa Dukuhwarigin, yang dimna SK tersebut dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten

²³ Wawancara dengan Kepala POKDARWIS, (Kudus, 30 mei 2022)

untuk diberikan langsung terhadap Pemerintah Desa Dukuh Waringin, yang akhirnya secara resmi menjadi Desa Wisata”²⁴

Selain hal tersebut support yang diberikan adalah dalam bentuk bantuan dana yang masuk alokasi anggaran pada tahun 2021 akhir dan dana tersebut di kelola oleh pemerintah desa Dukuhwaringin.

“Kebetulan tahun ini kita mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang itu, kita belanja untuk salah satunya ada Flyingfox, Gazebo(tempat bersantai), dan Infrastuktur penunjang Desa Wisata dilokasi dekat Kedung Gender”²⁵.

Dalam hal ini, peran pemerintah memegang peranan penting dalam berbagai aspek yang terkait dengan kekuatan untuk mengembangkan sektor pariwisata, seperti penyediaan fasilitas penunjang pariwisata secara menyeluruh dan kerjasama sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan pariwisata..

Adapun menurut Bapak Aris Istiyanto, A.Md selaku kepala desa Dukuhwaringin menuturkan bahwa :

“pihak Pemerintah Desa Dukuhwaringin sejak awal mula adanya tamu wisata telah mensupport tempat wisata Kedung Gender secara cepat, melalui tindakan kegiatan gotong royong yang di inisiasi oleh Kepala Desa bersama masyarakat dan pemuda desa untuk membuat akses menuju ke tempat wisata, dimana sebelumnya akses menuju tempat wisata tersebut hanya dapat diakses melalui jalur

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk. Aris Istianto, Kepala Desa Dukuhwaringin.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Aris Istianto, Kepala Desa Dukuhwaringin

sungai. Kepala Desa juga mengajak masyarakat untuk melakukan urun dana seikhlasnya guna membeli peralatan kerja yang pada saat itu belum ada alokasi dana untuk membangun akses ke tempat wisata tersebut”²⁶.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah pada pengembangan objek wisata di Desa Dukuhwaringin

Menurut J. Suyuthi Pulungan dalam buku Fiqih Siyasah menjelaskan Subyek penelitian hukum politik adalah hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Hubungan ini termasuk kebijakan legislatif, diplomasi masa damai dan masa perang, masalah kebijakan fiskal dan moneter. Disamping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan dan berkembang di dunia ini.²⁷

Menurut ulama fiqih Siyasah, pola hubungan pemerintah-nasional pada awalnya ditentukan oleh adat, sehingga berbeda negara memiliki perbedaan hubungan antara kedua negara. Namun, karena praktik ini belum tertulis, tidak ada batasan yang pasti mengenai hak dan kewajiban salah satu pihak dalam hubungan ini. Karena pemerintah memiliki kekuasaan atas rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya, maka tidak jarang pemerintah bersifat absolut dan otoriter terhadap pemerintah.

Dalam Kajian fiqih siyasah, perundang-undangan atau legislasi disebut juga al-Sultah al-Tasyri`iyah. Dengan kata lain, itu adalah kekuatan pemerintah Islam untuk membuat dan memberlakukan hukum. Islam menyatakan bahwa tidak seorang pun berhak memberlakukan hukum yang berlaku bagi umat Islam.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Aris Istianto, Kepala Desa Dukuhwaringin.

²⁷ Suyuthi, *Fiqih Siyasah ; Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal 29.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surat al-An'am.:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقْضُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ
 ٢٨ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : “*Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-qur’an) dari Tuhan, sedang kamu mendustakan. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamuminta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah*”.

Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Allah Swt. berfirman dalam surat Ali Imran ayat 32 yang berbunyi :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 ٢٩ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “*Taatilah Allah dan Rasul-nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir*”.

Dari penjelasan-penjelasan pada bagian-bagian di atas, dapat dijelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin bukanlah kewajiban yang sangat buta untuk dilaksanakan. Allah sebenarnya membenci orang-orang kafir, maka ketaatan berlaku jika pemimpinnya taat kepada Allah dan rasul-Nya.

Dalam fiqh siyasah,³⁰ Konstitusi juga disebut Dusturi. Debat konstitusi ini juga berkaitan dengan

²⁸ Referensi: <https://tafsirweb.com/2181-surat-al-anam-ayat-57.htm>

²⁹ Referensi: <https://tafsirweb.com/1164-surat-ali-imran-ayat-32.html>

sumber dan metode legislasi nasional, baik berupa sumber material maupun sejarah, sumber legislatif dan sumber interpretasi. Sumber informasi yang penting adalah pokok bahasan Undang-Undang Dasar, dan inti pokok dari sumber konstitusional ini adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan para korban. Susunan Undang-Undang Dasar tidak terlepas dari latar belakang sejarah masing-masing negara, termasuk masyarakat, politik dan budayanya, sehingga isi UUD mencerminkan aspirasi dan semangat masyarakat negara tersebut..

Dengan mengacu pada Pasal 80 Ayat 1, rencana pembangunan desa berdasarkan Pasal 79 dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa, dan akan dijelaskan kembali pada Ayat 2 pada saat pembuatan rencana pembangunan desa berdasarkan Ayat 1. Sudah selesai. Pemerintah wajib bermusyawarah untuk menyusun rencana desa. Dan lihat uraian sebelumnya tentang aspek-aspek fiqhsiyasah. Dalam hal ini pemerintah desa Dukuhwaringin menjalankan kewajiban dan fungsi pemerintahan sesuai dengan hukum yang berlaku dan aspek fiqih siyasah..

Adapun contoh penerapan yang dilakukan meliputi, adanya aktifitas gotongroyong pada saat memulai membangun tempat wisata yang melibatkan langsung masyarakat disekitar tempat wisata Kedung Gender, dan bahkan masyarakat ikut dilibatkan dalam hal urun dana pada proses pembangunannya. Hal tersebut juga dipertegas langsung oleh Bapak Hasanudin, selaku Ketua POKDARWIS.

“Kita bersama masyarakat dikumpulkan oleh Pak Kades untuk membuat akses kesana, jadi dibukalah akses kesana, dan akses itu dalam beberapa bulan sudah bisa dibuka, hal tersebut sangat luar biasa karena akses yang dibuka tersebut merupakan tebing, dan semangat anak-anak muda disini patungan dana karena tidak ada yang

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 2.

*mendonaturi, karena tidak adanya anggaran dana untuk dialokasikan untuk itu”.*³¹

Berdasarkan kebijakan Siyasaah Maliyah pada teori yang ada, menurut Ija Suntana terdapat 5 pilar yang di terapkan pada kondisi lapangan peneliti yaitu :

1) Menghidupkan faktor Manusia (pembangunan ekonomi harus memotivasi dan melibatkan setiap orang untuk melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan situasi ekonomi untuk sendiri dan orang lain) yang yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan tugasnya adalah :

a) Pembentukan koordinator bidang pada organisasi Pokdarwis

Pokdarwis merupakan Kelompok Sadar wisata dimana tujuan awal terbentuk adalah untuk mengurus dan mengelola tempat wisata, anggota Pokdarwis berasal dari perwakilan tiap-tiap Rt namun yang paling banyak adalah perwakilan dari Rt dimana tempat wisata berada yakni Rt 04 dan Rt 05 diwilayah Rw 01, sebelumnya anggota yang tergabung ialah karang taruna desa.

Data diatas ditegaskan dari hasil wawancara dengan bapak Hasanuddin :³²

“Pokdarwis ini berasal dari semua Rt tapi yang paling banyak berasal dari Rt yang berada di perdukuhan Dukuh Tawangsih yakni R 04 dan Rt 05”

b) Memberikan pelatihan pada pelaku industri Home stay

*“jadi pemilik Home stay di berikan bimbingan serta pelatihan langsung dari Dinas Pariwisata yang dilakukan oleh Pokdarwis dalam rangka memberikan edukasi kepada pemilik Home stay perihal bagaimana cara melayani dan menyambut tamu wisata”*³³

³¹ Wawancara dengan Kepala POKDARWIS, (Kudus, 30 mei 2022)

³² Wawancara Dengan Bapak Hasanuddin, 30 Mei 2022

³³ Wawancara Dengan Bapak Hasanuddin, 30 Mei 2022

- 2) Pengurangan pemutusan kekayaan (ada 2 point, Land Reform dan pengembangan perusahaan kecil dan mikro)
 - a) Land Reform yang dilakukan adalah mengaktifkan lahan kosong milik desa menjadi tempat Camping Ground, selanjutnya pemerintah akan membuka lahan kembali untuk Temzone diantara lain adalah Flying fox, Gazebo dll. Bapak Aris Isstianto menjelaskan bahwa :

“ada alokasi anggaran dari pemerintah Provinsi nantinya kami akan belanja anggaran tersebut untuk menunjang wisata air terjun kedung gender, seperti flying fox, gazebo dll itu semua akan kami tempatkan di lokasi baru yang lokasinya tidak jauh dari tempat wisata dan masih satu akses”³⁴
 - b) Pengembangan perusahaan kecil dan mikro, hal yang dilakukan pemerintah adalah pemerintah memfasilitasi lahan untuk pelaku UMKM yang terkenal dengan nama Seboyo Jati selain itu pemerintah membantu mempromosikan UMKM melalui kunjungan pada Paket Wisata. Hal ini dipertegas oleh penjelasan bapak Marlan selaku Pemilik Industri UMKM sebagai berikut :

“Umkm disini ditempatkan jadi satu dilokasi ini dinamai dengan Seboyo Jati, dan dari dampaknya sudah bisa mengangkat perekonomian bersama”³⁵
- 3) Restrukturisasi Ekonomi Publik (mendisiplinkan pemborosan dan prioritas dalam pengeluaran)
 - a) Mendisiplinkan pemborosan ini belum ada hak yang dilakukan oleh pihak pemdes dalam pengelolaan desa wisata
 - b) Prioritas dalam pengeluaran yang telah dilakukan Pemerintahan Desa adalah pengeluaran untuk kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas

³⁴ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa, 30 Mei 2022

³⁵ Wawancara dengan Bapak Marlan pelaku pemilik UMKM, 30 Mei 2022

publik yang di gunakan dalam pembukaan akses jalan, perencanaan pembangunan fasilitas penunjang wisata pada lahan baru. Di jelaskan oleh bapak Aris :

“rekananya akan kami belanjakan untuk kebutuhan penunjang wisata seperti Flying Fox, Gazebo, dll pada lahan baru ke tempat wisata”³⁶

- 4) Restrukturisasi Keuangan (Pengembangan Masyarakat Pinggiran dan pengoprasian sistem keuangan berbasis tanggung resiko bersama)
 - a) Pengembangan masyarakat pinggiran, dalam hal ini, belum ada hal mendetail yang dilakukan, dalam pengembangan masyarakat pinggiran kecuali masyarakat di sekitar tempat wisata yang telah merasakan dampak ekonomi sejak adanya tempat wisata, Yang awalnya jalan menuju tempat wisata Air Terjun Kedung Gender adalah tebing sungai yang dipenuhi rumput liar dengan semangat warga bergotong royong untuk membuat akses jalan yang lebih baik untuk menuju Air Terjun Kedung Gender. Ditegaskan wawancara dari bapak Hasanuddin :

“awal akses jalan itu tebing sungai, karena ada rombongan pertama dari boyolali untuk datang kewisata kami para warga sekitar bergotong royong membuat jalan dengan peralatan seadanya”³⁷
 - b) Pemerintah pada poin kedua ini belum melaksanakan
- 5) Perubahan Struktural (Revormasi institusi dan Perubahan kebijakan)
 - a) Revormasi Institusi, dalam hal ini yang dilakukan pemerintah tentang perubahan strategi perihal institusi mana yang harus didirikan dengan mempertimbangkan skala prioritas adalah membentuk organisasi kelompok sadar wisata dalam rangka mempermudah pengelolaan wisata.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa, 30 Mei 2022

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Hasanuddin, 30 Mei 2022

“Setelah akses tempat wisata jadi, kami meng-SKkan Pokdarwis atau kelompok sadar wisata agar dapat bertanggung jawab dalam mengelola tempat wisata tersebut”³⁸

- b) Perubahan kebijakan, dalam hal ini perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa akan membentuk BUMDes agar nantinya Pemerintah Desa lebih all out dalam pengelolaan wisata sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Bapak Aristiyanto selaku kepala desa Dukuhwaringin:

“dalam pengelolaannya saat ini pemerintah Desa belum all out tentunya, kedepannya kami akan membuat BUMDes agar dengan BUMDes kita bisa mensupport anggaran secara all out”³⁹

C. Analisis Data

1. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Objek Wisata di Desa Dukuhwaringin

Menurut Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 6 (Pasal 26) Tahun 2014, kepala desa dapat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa ditetapkan. masyarakat desa. Dalam memenuhi kewajiban pada ayat (1), ayat (2) dijelaskan bahwa walikota memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

³⁸ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa, 30 Mei 2022

³⁹ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa, 30 Mei 2022

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mempunyai kewenangan yang sudah dijelaskan dalam ayat (2) ketua Desa mempunyai hak dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) misalnya pertama, mengusulkan struktur organisasi & ketertiban kerja pemerintah desa, kedua, mengajukan rancangan & memutuskan peraturan desa.

Dalam implementasinya Pemerintah Desa Dukuhwaringin telah melakukan upaya mengikutsertakan serta mengajak masyarakat disekitar tempat wisata untuk berperan aktif dalam pembangunan akses menuju tempat wisata dan Pemerintah Desa Dukuhwaringin melibatkan beberapa stakeholder dari setiap perwakilan RT dan RW yang disatukan dalam bentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang nantinya kelompok tersebut bertanggungjawab penuh atas pengelolaan tempat wisata setiap harinya. Selain itu Pemerintah Desa juga memiliki perencanaan & pembangunan dalam rangka memajukan objek wisata melalui pengajuan rancangan dan menetapkan peraturan dalam prosesnya setelah mendapatkan alokasi bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Mengacu pada perundang-undangan diatas Kepala Desa Dukuhwaringin telah melaksanakan wewenang dan

hak nya meliputi pembentukan strukturisasi organisasi tata kerja Pemerintah Desa dan mengajukan rancangan & menetapkan peraturan desa. Adapun realita dilapangan yang dilakukan pemerintah Desa Dukuhwaringin sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa Dukuhwaringin melalui Kepala Desa Membentuk Struktur organisasi baru dalam rangka untuk mengelola tempat wisata yang bernama Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), seluruh anggota kelompok tersebut berasal dari Desa Dukuhwaringin dimana setiap anggota yang terpilih menjadi perwakilan dari Rt Rw masing-masing.
- b. Pemerintah Desa Dukuhwaringin berencana mengembangkan sektor wisata dengan pengajuan rancangan tata kelola lahan baru sebagai fasilitas penunjang sektor wisata dimana anggarannya diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Davey setidaknya terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain adalah ⁴⁰:

- a. Pertama, misi pemerintah sebagai penyedia layanan, yaitu terkait dengan penyediaan layanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah Desa Dukuhwaringin terbilang sudah melakukan hal sesuai konsep fungsi yang pertama ini, adapun contoh yang telah dilakukannya sesuai konsep fungsi yang pertama ini adalah menggerakkan masyarakat dalam memulai membuka jalur ke tempat wisata yang pada awalnya jalur tersebut hanya bisa dilalui dengan menyusuri sungai.

Selain itu Fungsi Pemerintahan yang telah dilakukan pada tugas Pokdarwis terbentuknya koordinator bidang Humas & Promosi, Koordinator Bidang Akomodasi & Transportasi , dalam rangka menyediakan layanan yang orientasinya untuk memajukan lingkungan tempat wisata adapun hal yang sudah dilakukan adalah membentuk Media Sosial seperti Facebook & Instagram untuk memajukan dan

⁴⁰ K.J. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah* (Jakarta: UI Press,1988),

mempromosikann Desa Wisata serta menyediakan akomodasi & transportasi dalam rangka mewujudkan pelayanan paket wisata yang ada pada tempat wisata.

- b. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. Pada konsep fungsi pengaturan, pemerintah telah melakukan perumusan dalam rangka memajukan tempat wisata Air Terjun Kedung Gender dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dimana kelompok tersebut tugasnya adalah menjalankan fungsi pengelolaan tempat wisata setiap harinya.

Fungsi pemerintahan pada tugas Pokdarwis pada konsep fungsi yang kedua ini adalah terbentuknya Koordinator Bidang Keamanan dalam hal ini bidang ini sangat berperan aktif dalam menjaga dan menegakkan segala peraturan yang ada pada tempat wisata, agar tempat wisata tersebut terjaga dan terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan.

- c. Ketiga, fungsi pembangunan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Pada konsep fungsi ketiga ini, pemerintah juga telah melakukan fungsi pembangunan, seperti membangun adanya UMKM di sekitar tempat wisata, serta mensupport UMKM tersebut dengan mengintegrasikan satu sama lain antara wisatawan Air Terjun dengan wisatawan UMKM.

Fungsi Pemerintahan pada tugas Pokdarwis dalam point ketiga ini adalah terbentuknya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang, Koordinator Bidang Wisata Kuliner dan Home Industri, serta Koordinator Home Stay. Dimana pada masing-masing Koordinator bidang tersebut berfungsi sebagai pengawas pada setiap UMKM yang ada dan hal tersebut sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian warga masyarakat disekitar tempat wisata.

- d. Keempat, fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat diluar wilayah mereka. Pada poin ke empat

perihal fungsi perwakilan, dalam kaitanya mewakili masyarakat diluar wilayah ini, penulis belum melihat adanya peran yang sangat krusial yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Dukuhwaringin.

- e. Kelima, fungsi koordinasi, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan. Dalam fungsi ini, pemerintah cukup sangat baik dalam fungsi koordinasi, mengingat sudah ditetapkannya desa Dukuhwaringin sebagai Desa wisata pada tahun 2019, serta pada tahun 2022 ini pemerintah desa juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Provinsi Jateng, dalam alokasi anggaran dana tahun 2021 guna mengembangkan potensi wisata.

Fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Pokdarwis pada point kelima ini adalah menjalin komunikasi dengan kelompok sadar wisata dari kota lain serta menjalin kerjasama dengan beberapa birowisata.

2. Fiqih Siyasaah pada pengembangan objek wisata di Desa Dukuhwaringin

Terdapat Lima pilar dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang ada pada Fiqih Siyasaah Maliyah⁴¹, yaitu :

- a. Menghidupkan Faktor Manusia, Tujuan dari keterlibatan faktor manusia adalah bahwa pembangunan ekonomi perlu dimotivasi dan bahwa setiap orang harus mampu melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk memperbaiki situasi ekonomi diri mereka sendiri dan orang lain..

Dari hasil lapangan peneliti, pemerintah Desa telah melaksanakan tugas dalam pengembangan objek wisata dengan membentuk anggota pada masing-masing bidang kelompok sadar wisata di desa Dukuhwaringin dan Pemerintah Desa juga memberikan pelatihan pada pelaku industri homestay perihal tata cara menerima dan melayani tamu wisata.

⁴¹ Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam(Siyasaah Maliyah), Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 18-19

b. Pengurangan Pemutusan Kekayaan. Kebijakan untuk mengurangi penghentian harta kekayaan dapat dilakukan dengan memberlakukan kebijakan seperti berikut :

1) Land Reform yaitu politik ekonomi islam menganjurkan rehabilitasi lahan agar lebih produktif. Hal ini dilakukan dengan mengembalikannya ke kondisi semula , sehingga dapat kembali berproduksi dan memberikan penghidupan bagi warganya.

Pemerintah telah membuat rencana kerja untuk mengalokasikan anggaran yang diperoleh dari Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah guna menunjang fasilitas wisata serta meningkatkan minat pengunjung tempat wisata.

2) Pengembangan Perusahaan Kecil dan Mikro, pengembangan usaha kecil dan mikro yang efisien akan mengurangi pemutusan kekayaan. Pengembangan usaha kecil dan mikro dapat difasilitasi dengan menyuntikkan dana untuk membuat aturan khusus bagi merek.

Pemerintah dalam hal ini telah memfasilitasi lahan untuk pelaku UMKM yang dinamakan dengan Seboyo Jati dan pemerintah membantu dalam mempromosikan UMKM melalui kunjungan paket wisata.

c. Restrukturisasi Ekonomi Publik

1) Mendisiplinkan Pemborosan, dalam hal ini pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menertibkan pemborosan dalam dua hal yaitu : pertama, membantu masyarakat memahami dalam keterbatasan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Kedua, menyadarkan masyarakat terhadap mereka jika memiliki sikap boros, mereka akan berakhir dengan konsekuensi negatif.

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan bahwa belum ada hasil dari penelitian yang didapatkan penulis mengenai poin ini.

2) Prioritas dalam Pengeluaran, para ahli Politik Ekonomi Islam telah merumuskan empat aturan

terkait dengan pengeluaran aset negara, yang meliputi : pertama, kekayaan negara dalam pengeluaran harus di bagi dalam kesejahteraan umum. Kedua, pengeluaran dalam hal ini diutamakan kepada penderita dan menanggulangi kesulitan masyarakat. Ketiga, pengeluaran untuk kepentingan umum dalam hal ini harus diutamakan seperti pembangunan fasilitas publik untuk kegiatan suatu organisasi kemasyarakatan atau keagamaan.

Yang telah dilakukan oleh Pemdes adalah pengeluaran untuk kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas publik yang dibangun ialah akses jalan.

d. Restrukturisasi Keuangan

- 1) Pengembangan masyarakat sekitar. Kajian kebijakan ekonomi Islam memiliki batasan pada alokasi pendapatan pemerintah. Beberapa pendapatan pemerintah tidak dapat dibagikan secara publik kepada siapa pun, tetapi harus didistribusikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Dalam catatan sejarah, Umar bin Khathab memberikan pemasukan dari zakat fitrah dan fidyah, terutama untuk pengembangan masyarakat yang terpinggirkan (badiyah)..

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan bahwa belum ada hasil yang didapatkan penulis mengenai poin ini. Namun pada masyarakat disekitar tempat wisata telah merasakan dampak ekonomi dengan adanya wisata di Desa Dukuhwaringin.

- 2) Pengoperasian Sistem Keuangan Berbasis Tanggung Resiko Bersama Sistem fiskal Islam menghendaki supaya sistem keuangan dioperasikan menurut tanggungan resiko beserta, tanggungan resiko beserta disertai imbalan sang forum-forum keuangan akan mengurangi ketidakpastian posisi rakyat kelas bawah waktu mengakses forum perbankan & menjalan aktivitas usaha. Pedagang mini akan terselamatkan berdasarkan beban berat

membayar bunga dalam masa-masa sulit menggunakan kesiapannya membayar laju laba yg lebih tinggi dalam masa lapang.

Peneliti dalam pilar poin ini belum menemukan wujud dari hasil yang dimaksud.

e. Perubahan Struktural

- 1) Reformasi Kelembagaan Reformasi kelembagaan merupakan penilaian dan perubahan strategis mana yang harus dibentuk, mana yang harus dikurangi dan yang harus ditutup. Pengkajian dan perubahan strategis harus dipertimbangkan berdasarkan prioritas (al-aulawiyat) dan rasionalitas faktual, dan saat menyusun anggaran..

Hasil lapangan yang ada Pemerintah telah mendirikan dengan suatu pertimbangan skala prioritas dalam pembentukan organisasi kelompok sadar wisata untuk mempermudah pengelolaan wisata di Desa Dukuhwaringin.

- 2) Perubahan kebijakan yang proporsional Perubahan cepat terhadap kebijakan yang belum menunjukkan hasil, termasuk prasangka politik yang berbahaya. Terlalu banyak perubahan kebijakan berbasis non profit yang termasuk dalam bentuk pemborosan struktural. Oleh karena itu, perubahan kebijakan harus dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kebutuhan yang ada dan menjaga kepentingan masyarakat secara proporsional dengan kebijakan yang diambil.

Dalam hal ini pemerintah Desa Dukuhwaringin belum ada perihal perubahan kebijakan untuk wisata.

Pada analisis Fiqih Siyash Maliyah nya sendiri di terangkan dari teori diatas secara umum pemerintah desa telah menjalankan hak dan wewenang nya sesuai dengan perundang-undangan yang ada serta sesuai dengan teori diatas. Kedepannya Pemerintah Desa Dukuhwaringin berencana pada tahun 2022 akan mengelola tempat wisata Kedung Gender secara lebih baik lagi kedepanya, dengan membuatkan BUMDES sebagai naungan tata kelola dari tempat wisasta. dan

Wisata Air Terjun Kedung Gender nantinya akan masuk pada salah satu unit wisata yang berada pada naungan Desa yang pengelolaannya sendiri di kelola langsung oleh Pokdarwis.

Selain itu segi Fiqih Siyasyah Maliyah yang lain juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berupa pemberian bantuan dana kepada Pemerintah Desa Dukuhwaringin sebagai bentuk dukungan pada Tempat Wisata Air Terjun Kedung Gender, dimana dana tersebut diberikan secara tupoksi ke struktur pemerintah dibawahnya, hingga sampai pada pihak pemerintahan Desa Dukuhwaringin. Dana tersebut masuk dalam alokasi anggaran pada tahun 2021 akhir dan dilaksanakan pada tahun 2022. Selanjutnya dana tersebut di gunakan oleh pemerintah Desa Dukuhwaringin untuk membeli infrastruktur penunjang kemajuan pariwisata Kedung Gender yang berupa flying fox, gazebo, dan alat penunjang lain.

Dalam segi fiqih siyasah yang telah dilakukan oleh Pokdarwis perihal analisis penerapan Fiqih Siyasyah Maliyah Pokdarwis telah melakukan upaya meningkatkan pengunjung wisata yang berdampak meningkatnya ekonomi dengan memunculkan adanya paket wisata 30.000 dimana paket wisata tersebut saling terintegrasi dengan UMKM serta Home Industri yang berada di sekitar tempat wisata.